

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES

VOLUME 3 NOMOR 1 JULI 2020



Identitas Sosial dalam Konsep Multi-Identitas di Indonesia Perspektif Ahmad Syafii Ma'arif

Muhammad Iqbal Rabman

Pembacaan Hizb Ghazâlî di Pondok Pesantren Luqmaniyyah Yogyakarta Perspektif Teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim

Oki Dwi Rabmanto

Living Hadis dalam Tradisi Ziarah dan Bersih Kubur di Desa Majapura, Purbalingga

Avina Amalia Mustaghfiroh

Resepsi atas Hadis Bacaan Salat Jum'at di Masjid UIN Sunan Kalijaga oleh Robert Nasrullah

Shobibul Maqom

Interpretasi Simbolik atas Narasi Keagamaan KH. Abdul Ghofur Lamongan

Mohammad Fiqih Firdaus

Socio-Entrepreneurship Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam Membentuk Kesalehan Sosial di Tengah COVID-19

Asep Maulana Robimat

Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi COVID-19 di Media Online Indonesia

Siti Khodijah Nurul Aula

Pemaknaan Syair Li Khamsatun di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Living Islam

H. Zubri

Matthew Lipman's Pragmatism and The Relevance of Philosophy for Children (P4C) to Children's Education in Malaysia

Salma binti Ismail

Wajah Sufisme Antroposentris Kepustakaan Islam Kejawen dalam Pandangan Simuh

Miftachul Huda

Tauhid sebagai Fondasi Keadilan Sosial dalam Pemikiran Tan Malaka

Reza D. Tobis

Hasrat Manusia Menuju Tuhan dalam Novel Hayy bin Yaqzan karya Ibn Tufayl

Iftitab



ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)

Volume 3 Nomor 1, Juli 2020

Living Islam: The Journal of Islamic Discourses is an academic journal designed to publish academic work in the study of Islamic Philosophy, the Koran and Hadith, Religious Studies and Conflict Resolution, both in the realm of theoretical debate and research in various perspectives and approaches of Islamic Studies, especially on Islamic Living of particular themes and interdisciplinary studies.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses published twice a year (June and November) by the Department of Islamic Aqeedah and Philosophy, the Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses

Prodi Magister Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274) 512156
Email: living.islam@uin-suka.ac.id
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/index>

PEER REVIEWER

Ajat Sudarajat - Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Al Makin - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Mohammad Amin Abdullah - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Mouhanad Khordichide - Universitat Munster Germany
Umma Farida - IAIN Kudus, Indonesia
Mun'im Sirry - Notre Dame University, USA
Sahiron - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Mohammad Anton Ato'illah - UIN Sunan Gunung Djari Bandung, Indonesia
Muhammad Alfatih Suryadilaga - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Inayah Rohmaniyah - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

EDITOR IN-CHIEF

H. Zuhri - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

MANAGING EDITOR

Rizal Al Hamid - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

EDITOR

Achmad Fawaid - Universitas Nurul Jadid Paiton, Probolinggo
Ahmad Rafiq - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ahmad Zainul Hamdi - UIN Sunan Ampel Surabaya
Aksin Wijaya - IAIN Ponorogo
Chafid Wahyudi - STAI Al-Fitrah Surabaya
Fadhli Lukman - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fahrudin Faiz - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Islah Gusmian - IAIN Surakarta
Miski - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Saifuddin Zuhri Qudsy - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

OPEN ACCESS JOURNAL INFORMATION

Living Islam: Journal of Islamic Discourses committed to principle of knowledge for all. The journal provides full access contents at
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/index>

DAFTAR ISI

Identitas Sosial dalam Konsep Multi-Identitas di Indonesia Perspektif Ahmad Syafii Ma'arif <i>Mubammad Iqbal Rahman</i>	1-24
Pembacaan Hizb Ghazâlî di Pondok Pesantren Luqmaniyyah Yogyakarta Perspektif Teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim <i>Oki Dwi Rahmanto</i>	25-46
Living Hadis dalam Tradisi Ziarah dan Bersih Kubur di Desa Majapura, Purbalingga <i>Avina Amalia Mustaghfiroh</i>	47-64
Resepsi atas Hadis Bacaan Salat Jum'at di Masjid UIN Sunan Kalijaga oleh Robert Nasrullah <i>Shohibul Maqom</i>	65-82
Interpretasi Simbolik atas Narasi Keagamaan KH. Abdul Ghofur Lamongan <i>Mohammad Fiqib Firdaus</i>	83-104
Socio-Entrepreneurship Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam Membentuk Kesalehan Sosial di Tengah COVID-19 <i>Asep Maulana Robimat</i>	105-124
Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi COVID-19 di Media Online Indonesia <i>Siti Khodijah Nurul Aula</i>	125-148
Pemaknaan Syair Li Khamsatun di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Living Islam <i>H. Zubri</i>	149-166
Matthew Lipman's Pragmatism and The Relevance of Philosophy for Children (P4C) to Children's Education in Malaysia <i>Salma binti Ismail</i>	167-188
Wajah Sufisme Antroposentris Kepustakaan Islam Kejawen dalam Pandangan Simuh <i>Miftachul Huda</i>	189-208
Tauhid sebagai Fondasi Keadilan Sosial dalam Pemikiran Tan Malaka <i>Reza D. Tobis</i>	209-230
Hasrat Manusia Menuju Tuhan dalam Novel Hayy bin Yaqzan karya Ibn Tufayl <i>Ifitab</i>	231-255

IDENTITAS SOSIAL DALAM KONSEP MULTI-IDENTITAS DI INDONESIA PERSPEKTIF AHMAD SYAFII MAARIF

Muhammad Iqbal Rahman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

synyster1375@gmail.com

Abstract

This article seeks to elaborate Ahmad Syafii Maarif's thoughts on the issue of diversity of identities in Indonesia. The reflection is related to the main problems about the state, religion, and morality that are triggered by conflicts of interest and political identity. Diversity is a social reality for the Indonesian, as a country based on Pancasila and *Bhinneka Tunggal Ika* (Unity in Diversity). According to Syafii Maarif, in the case of multi-identity problems in Indonesia, this requires government intervention, although Syafii Maarif also criticizes government policies because this problem is related to collective responsibility. On the other hand, diversity is also a divine reality that is taught in the Holy Qur'an as a guide for life. Syafii Maarif has emphasized that the majority of Muslims in Indonesia need to express their faith. Therefore, the contextualization of the Qur'an as faith and intellectual practice requires wisdom and deep contemplation. The contextualization of these values is always needed at all times, as the function of the Qur'an as *al-furqān* (the difference between right and wrong). Finally, Syafii Maarif's thought on the issue of multi-identity was an attempt to realize Islamic humanist values and bridge them with Pancasila.

Keyword: *Ahmad Syafii Maarif, Multiidentity, Pancasila, Identity, Social*

Abstrak

Artikel ini berupaya menguraikan pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang masalah keragaman identitas di Indonesia. Refleksi ini terkait dengan masalah utama tentang negara, agama, dan moralitas yang dipicu oleh konflik kepentingan dan identitas politik (ego). Pada dasarnya, keberagaman adalah realitas sosial bagi masyarakat Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* (Unity in Diversity). Menurut Syafii Maarif, dalam kasus masalah multi-identitas di Indonesia, ini memerlukan intervensi pemerintah, meskipun Syafii Maarif juga mengkritik kebijakan pemerintah, karena masalah ini terkait dengan tanggung jawab kolektif. Di sisi lain, keberagaman juga merupakan realitas ilahi yang diajarkan dalam wahyu suci (Alquran) sebagai pedoman hidup. Syafii Maarif telah menekankan bahwa mayoritas Muslim di Indonesia perlu mengekspresikan keyakinan mereka. Karena itu, kontekstualisasi Alquran sebagai keimanan dan praktik intelektual membutuhkan kearifan dan kontemplasi yang mendalam. Kontekstualisasi nilai-nilai ini selalu



dibutuhkan setiap saat, sebagai fungsi Al-Qur'an sebagai al-furqān (perbedaan antara benar dan salah). Akhirnya, pemikiran Syafii Maarif tentang masalah multi-identitas adalah upaya untuk mewujudkan nilai-nilai humanis Islam dan menjembatani mereka dengan Pancasila.

Kata Kunci: *Ahmad Syafii Maarif, Multiidentitas, Pancasila, Identitas, Sosial*

Pendahuluan

Identitas Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim yang besar masih menjadi problem yang layak untuk diperbincangkan. Identitas yang mengacu pada ciri khusus, tanda, dan jati diri individu, kelompok atau bahkan negara¹ masih terus di perselisihkan hingga 74 tahun kemerdekaan Indonesia. Konsep-konsep ke-Islaman, nasionalisme dan kebinekaan sering dihadapkan antara satu dengan yang lain. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, dijadikan sebagai alasan utama untuk merubah identitas Indonesia yang terdiri dari beragam agama, menjadi negara yang berdasarkan pada aturan-aturan agama Islam. Konsep ini dalam kajian Masdar Hilmy disebut sebagai sentrifugalisme Islam.²

Untuk mencapai tujuan ini, banyak kalangan memunculkan propaganda yang menggambarkan kegagalan sistem negara yang dianut Indonesia. Hal ini berdampak pada terjadinya krisis identitas yang pada akhirnya memunculkan sikap-sikap radikalisme yang bertujuan untuk mengubah sistem negara menjadi negara Islam. Fakta ini dapat diperkuat dengan hasil survei yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2018, yang menemukan bibit-bibit radikalisme tumbuh dan berkembang di dalam institusi negara dan bermula di institusi keagamaan.³ Gerakan ini menandakan tahap eskalasi dalam teori gerakan sosial. Tahap eskalasi ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan protes dan aksi-aksi yang lebih nyata dari sebuah organisasi untuk menyuarakan keinginan dan tujuannya.⁴ Gerakan-gerakan protes sebagai bagian dari konflik identitas di Indonesia ditandai dengan

¹ Joanna W. A. Rummens, "Personal Identity and Social Structure in Saint Martin: A Plural Identities Approach" (York University, 2013), 157.

² Masdar Hilmy, "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (January 22, 2014): 2, <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13>.

³ Dian Erika Nugraheny, "BIN: Tujuh PTN Di 15 Provinsi Terpapar Paham Radikal | Republika Online," accessed April 21, 2020, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/11/20/pii02s354-bin-tujuh-ptn-di-15-provinsi-terpapar-paham-radikal>.

⁴ John L. Esposito, "The Muslim Diaspora and The Islamic World," in *Islam, Europe's Second Religion: The New Social, Cultural, and Political Landscape*, ed. Shireen Hunter (Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2002), 255.

munculnya gerakan-gerakan perebutan pos-pos strategis yang dilakukan oleh organisasi Islam transnasional yang menginginkan ditegakkannya *kebila>fab Isla>miyah* di Indonesia.⁵

Problem identitas ini berujung pada usaha mengidentifikasi diri dan berdampak pada proses pengidentitasan yang lain. Dalam kajian Erik Erikson, identitas diri dihasilkan dari observasi yang dilakukan oleh seseorang yang menghasilkan satu konsep tentang diri dan kesadaran bahwa ia berbeda dengan yang lain. Konsep identifikasi diri ini dapat berdampak pada penentuan identitas bagi yang lain, sehingga memunculkan anggapan seseorang yang tidak memiliki kriteria yang sama dengannya, dianggap berbeda dan berpotensi salah.⁶ Dalam konteks bernegara, pandangan ini akan memunculkan *stereotypes*. Kemunculan *stereotypes* dalam penentuan identitas negara dapat melahirkan intimidasi psikologis yang mengakibatkan perasaan terancam dari satu pihak yang dilakukan oleh pihak yang lain.⁷ Dalam konteks ini, penguatan atas identitas-identitas yang majmuk di Indonesia mengakibatkan saling berkonflik untuk menetapkan identitas diri dari sebuah organisasi menjadi identitas tunggal yang dianut di Indonesia.

Pertarungan identitas ini diperuncing oleh ketidaksamaan pandangan mengenai identitas visual dan identitas sosial. Identitas visual menekankan pada penanaman nilai-nilai ke-Islaman dalam negara secara visual. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, harus menonjolkan identitas Islam secara nyata. Sedangkan, pandangan Islam sebagai identitas sosial beranggapan bahwa Islam tidak diperlukan untuk menjadi atribut-atribut yang nampak. Identitas Islam dalam negara dicukupkan dalam praktik-praktik sosialnya.⁸ Identitas visual maupun identitas sosial menekankan pada peran Islam dalam dinamika kenegaraan. Meskipun demikian, pengidentifikasian kepada salah satu pandangan tersebut akan mengakibatkan *truth claim* (klaim kebenaran), sehingga berimplikasi pada pelabelan salah pada yang lain. Hal ini yang kemudian akan menyebabkan konflik dan memancing problem-problem lanjutan yang dapat mengganggu stabilitas negara.

⁵ Agus Salim, "The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia (1982-2004) Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilization, and Collective Action Frames" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), 39–57.

⁶ Erik H. Erikson, *Identity and The Life Cycle* (New York: W.W. Norton, 1994), 20.

⁷ Jamie Jaramillo, Zena R. Mello, and Frank C. Worrell, "Ethnic Identity, Stereotype Threat, and Perceived Discrimination Among Native American Adolescents," *Journal of Research on Adolescence* 26, no. 4 (December 1, 2016): 769–75, <https://doi.org/10.1111/jora.12228>.

⁸ Himayatul Ittihadiyah, "MERUNUT IDENTITAS ISLAM INDONESIA (Kajian Historiografi Menurut Ulama Kontemporer Yogyakarta, Perspektif Muhammadiyah, NU, HTI, Dan MMI)," *Jurnal Penelitian Agama* 17, no. 3 (2008): 594.

Dalam perdebatan dua pandangan tersebut, Ahmad Syafii Ma'arif mengembangkan pendekatan lain, yang dapat mensinergikan identitas visual Islam dan identitas sosialnya. Menurutnya, Islam dapat bersinergi dengan ideologi Indonesia, yakni Pancasila. Islam dapat menjadi landasan moral dalam proses kebijakan publik untuk kepentingan seluruh bangsa, tanpa melihat perbedaan agama dan keyakinan hidup. Syafii Ma'arif juga berpendapat bahwa Islam sebagai mayoritas haruslah ditempatkan dalam parameter kualitatif-substansial, bukan parameter kuantitatif-nominal-superfisial yang dapat menyesatkan dan memicu konflik.⁹ Sebagai bentuk visualisasi ke-Islaman, Syafii Ma'arif menyarankan agar umat Islam selalu aktif dalam proses identifikasi diri dengan membuktikan kualitas keimanannya dengan mencerminkan tindakannya sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an.¹⁰

Meskipun demikian, konsep multi-identitas dalam pemikiran Syafii Ma'arif jarang menjadi objek kajian para peneliti terutama dalam dinamika ke-Indonesiaan yang sedang rawan krisis identitas, sehingga banyak memunculkan *truth claim* golongan dan munculnya paham-paham radikalisme. Beberapa peneliti mengenai pemikiran Ahmad Syafii Ma'arif mengacu pada tiga kategori. *Pertama*, penelitian yang terfokus pada konsep toleransi. Penelitian dengan fokus pembahasan seperti ini dilakukan oleh Damanhuri dengan judul *Islam, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan (Telaah Pemikiran Ahmad Syafii Maarif)*.¹¹ Hal yang sama juga dilakukan oleh Muhammad Qorib dengan judul *Ahmad Syafii Ma'arif: Kajian Sosial-Intelektual dan Model Gagasan Ke-Islamannya*.¹² Begitu juga dengan penelitian Wandu dengan judul *Menelaah Kembali Gagasan Pemikiran dan Perjuangan Ahmad Syafii Maarif Jalan Tengah Keberagaman*¹³, dan penelitian yang dilakukan oleh M. Wahid Nur Tualeka dengan judul *Konsep Toleransi Beragama Menurut Buya Syafi'i Ma'arif*.¹⁴

⁹ Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam Dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban* (Yogyakarta: DIVA Press, 2018), 113–14.

¹⁰ Ahmad Syafii Ma'arif, "Menimbang Kembali Ke-Indonesiaan Dalam Kaitannya Dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebinekaan Dan Toleransi," in *Fikih Kebinekaan*, ed. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Muhammad Abdullah Darraz, and Ahmad Fuad Fanani (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 27.

¹¹ Damanhuri Damanhuri, "ISLAM, KEINDONESIAAN, DAN KEMANUSIAAN (TELAH PEMIKIRAN AHMAD SYAFII MAARIF)," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (February 11, 2016), <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v14i1.644>.

¹² Muhammad Qorib, "Ahmad Syafii Maarif: Kajian Sosial-Intelektual Dan Model Gagasan Keislamannya," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (December 30, 2017): 63–82, <https://doi.org/10.30596/intiqad.v9i2.1383>.

¹³ Wandu Wandu, M Arif Musthofa, and Khusnul Yatima, "MENELAHAH KEMBALI GAGASAN PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN AHMAD SYAFII MAARIF JALAN TENGAH KEBERAGAMAN," *KERATON: Journal of History Education and Culture* 1, no. 2 (January 12, 2020), <https://doi.org/10.32585/KERATON.V1I2.519>.

¹⁴ M. Wahid Nur Tualeka, "Konsep Toleransi Beragama Menurut Buya Syafi'i Ma'arif," *Al-Hikmah* 4, no. 1 (January 6, 2019), <http://103.114.35.30/index.php/Ah/article/view/2333>.

Kedua, penelitian yang terfokus pada pembahasan mengenai konsep-konsep kenegaraan. Penelitian semacam ini dilakukan oleh Putri Wulansari dengan judul *Sekulerisasi Politik dan Ulama di Indonesia dalam Prespektif Ahmad Syafii Maarif*.¹⁵ Penelitian yang lain dilakukan oleh Leni Marlana dengan judul *Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif*.¹⁶ *Ketiga*, penelitian mengenai konsep-konsep pemikiran Ahmad Syafii Ma'arif dalam bidang pendidikan. Penelitian dalam kategori ini dilakukan oleh Muchrom Wikandono dengan judul *The Development of Contemporary Islamic Thought in Indonesia in the 2013 Curriculum (Ahmad Syafi'i Ma'arif's Thoughts)*,¹⁷ dan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ali dengan judul *Pemikiran Pendidikan Islam Ahmad Syafii Maarif*.¹⁸

Penelitian-penelitian tersebut justru tidak membahas konsep multi-identitas Ahmad Syafii Ma'arif yang merupakan bagian penting dari konsep kenegaraannya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan konsep-konsep multi-identitas dalam pemikiran Ahmad Syafii Ma'arif yang merupakan landasan dari konsep toleransi dan relasi antara agama dan negara. Konsistensi Syafii Maarif dalam menerapkan landasan-landasan moral Islam dalam bernegara, tidak menjadikan Islam sebagai identitas visual negara akan tetapi identitas sosial, sehingga identitas Islam tidak diperlukan untuk dimunculkan di Indonesia. Hal inilah yang menjadi *point* lebih yang akan diuraikan dalam penelitian ini untuk memberikan diferensiasi pemikiran Syafii Maarif dengan pemikiran tokoh lain yang juga menjadikan al-Qur'an sebagai landasan akan tetapi justru menuntut agar negara secara visual mengusung konsep negara Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka dengan menggunakan rujukan primer karya-karya yang ditulis oleh Ahmad Syafii Maarif. Meskipun demikian, literatur lain yang dapat mendukung dalam proses pengumpulan data juga digunakan, yakni beberapa kajian terdahulu yang membahas mengenai pemikiran Syafii Maarif. Untuk mendukung analisa terhadap data yang terkumpul, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika yang digagas oleh

¹⁵ Putri Wulansari, "SEKULERISASI POLITIK DAN ULAMA DI INDONESIA DALAM PRESFEKTIF AHMAD SYAFII MAARIF," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikir* 7, no. 2 (July 17, 2018): 235–44, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v7i2.2524>.

¹⁶ Leni Marlana, "Hubungan Islam Dan Negara Dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif," *Manthiq* 3, no. 2 (February 27, 2020), <https://doi.org/10.29300/MTQ.V3I2.2898>.

¹⁷ Muchrom Wikandono and Aman, "The Development of Contemporary Islamic Thought in Indonesia in the 2013 Curriculum (Ahmad Syafi'i Ma'arif's Thoughts)" (Atlantis Press, 2020), 79–82, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.017>.

¹⁸ Mohamad Ali, "PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM AHMAD SYAFII MAARIF," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 17, no. 02 (October 7, 2017): 1, <https://doi.org/10.23917/profetika.v17i02.5293>.

Hans-Georg Gadamer.¹⁹ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa ruang kesejarahan yang dimiliki oleh Ahmad Syafii Ma'arif yang dapat mempengaruhi segala bentuk pemahamannya.

Identitas Islam dan Identitas Indonesia: Pertarungan Visual vs Sosial

Indonesia sebagai negara yang multikultural dan menganut sistem demokrasi masih tergolong negara yang masih muda. Ketidakmatangan dalam pengelolaan masyarakat yang multikultural tampak jelas dari berbagai konflik yang muncul dan melibatkan SARA.²⁰ Konflik lain yang juga muncul adalah konflik yang melibatkan klaim identitas negara. Konflik ini merupakan konflik berkepanjangan dalam sejarah kedaulatan negara yang selalu melibatkan agama dengan negara sebagai kutub yang berlawanan.²¹ Bahkan, konflik ini semakin meruncing dengan menyebarnya paham Islam transnasional di Indonesia. Pertanyaan mengenai keabsahan identitas negara mulai dipertanyakan kembali dengan mengaitkannya dengan konsep-konsep agama yang dianggap lebih mapan.²²

Konsep relasi Islam dengan negara, sering diperkuat dengan adigum Islam adalah agama dan negara. Menurut pandangan ini, kedudukan negara sebagai institusi politik sejajar dengan kedudukan Islam sebagai agama. Islam tanpa negara bukanlah Islam yang utuh. Oleh sebab itu, mendirikan suatu negara yang bernama negara Islam adalah bagian mutlak dari Islam. Akan tetapi, jika konsep ini ditelusuri dengan cermat dalam berbagai ayat al-Qur'an dan sunnah, tidak akan ditemukan bukti apapun yang mengatakan bahwa Islam adalah agama dan negara.²³ Meskipun demikian, pada preposisi yang sama kebanyakan pemikir muslim modern menganggap bahwa negara sebagai institusi politik tertinggi sangat diperlukan untuk mencapai dan merealisasikan cita-cita moral Islam yang meliputi seluruh dimensi kemanusiaan dapat diterima sebagai suatu yang mengandung kebenaran, baik dari segi ajaran maupun kenyataan. Di sini posisi negara adalah sebagai suatu instrumen yang vital, sebab tanpa instrumen ini cita-cita moral Islam tidak mungkin dapat dibumikan.²⁴

¹⁹ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (London: Continuum, 2006), 390.

²⁰ Tiara Kharisma, "Konflik SARA Pada Pilkada DKI Jakarta Di Grup WhatsApp Dengan Anggota Multikultural," *Jurnal Penelitian Komunikasi* 20, no. 2 (December 18, 2017): 107–20, <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.233>.

²¹ Agus Saputro, "AGAMA DAN NEGARA: POLITIK IDENTITAS MENUJU PILPRES 2019," *ASKETIK* 2, no. 2 (December 25, 2018): 111–20, <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912>.

²² Franco Burgio, *Hiżb Ut-Tabrir in Central Asia: Messengers of a Coming Revolution?* (Norderstedt: Druck Und Bindung, 2007), 39.

²³ Said Agil Husin Al-Munawar, "Fikih Siyasa Dalam Konteks. Perubahan Menuju Masyarakat Madani," *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (1999): 31.

²⁴ Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Dan Sejarah Pemikirannya* (Jakarta: UI Press, 1993), 1.

Menurut Syafii Maarif, sebagai suatu instrumen, negara tidak perlu bernama negara Islam. Apalagi untuk konteks keindonesiaan, negara Pancasila dapat dijadikan instrumen yang baik untuk mencapai dan melaksanakan cita-cita moral Islam berupa kebebasan, keadilan, kemakmuran, persamaan, persaudaraan, dan lain sebagainya.²⁵ Pokok yang perlu dijadikan perhitungan adalah intervensi wahyu sebagai sumber moral transendental, yang dalam hal ini adalah al-Qur'an. Al-Qur'an, sebagaimana disampaikan oleh M. Quraish Shihab, melukiskan cahaya Ilahi yang menerangi langit, bumi dan isi dari keduanya bagaikan pelita yang diletakkan dalam lubang satu tembok yang tidak tembus. Pelita itu berkaca, bening kacanya bagaikan mutiara. Minyak yang menyalakan apinya adalah minyak zaitun istimewa, yang pohonnya tumbuh di puncak bukit sehingga tidak pernah luput dari cahaya matahari, baik ketika terbit maupun ketika dalam perjalanan terbenam. Minyaknya saja sudah hampir menyala walaupun tidak disentuh api (*nur 'ala nur*) cahaya di atas cahaya.²⁶

Intervensi wahyu terkadang dipaksakan untuk masuk ke dalam dasar-dasar negara sebagai landasan moral. Dalam konteks ini, Syafii Ma'arif menilai bahwa jika berbicara tentang moral yang bersumber dari nilai-nilai kenabian antar agama, akan ditemukan banyak persamaan. Dengan demikian, suatu usaha bersama untuk menggali dan merumuskan nilai-nilai kenabian antar agama dapat dilakukan. Lebih dari itu diperlukan keinginan politik yang keluar dari rasa tanggung-jawab dan sifat kenegarawan yang dewasa.²⁷ Tanpa dua aspek yang terakhir itu, tidak ada diskusi mendasar yang mungkin dilakukan di Indonesia. Bagi Islam sendiri, dengan mengukuhkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada tempat pertama dan sila Keadilan Sosial pada tempat terakhir, sebenarnya tidak akan mengundang masalah. Jika seseorang belajar tentang al-Qur'an dengan cermat, tepat dan menyeluruh mengaplikasikan teks secara kontekstual, maka ia akan menemukan dua prinsip dasar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni prinsip tauhid dan keadilan. Tauhid dalam arti memomorsatukan Tuhan, dan keadilan yang mencakup ruang yang sangat luas di mana pun manusia berada.

Bertolak dari kebanyakan preposisi pemikir muslim modern, Syafii Ma'arif mencoba menghubungkan ajaran al-Qur'an dengan kenyataan dan tuntutan sosio-politik kontemporer di Indonesia. Al-Qur'an sepenuhnya menyediakan petunjuk moral yang sempurna bagi manusia, namun yang perlu diaktualisasikan dalam konteks ke-Indonesiaan adalah perumusan sistematis, mendalam, komprehensif, dan cermat bagi kepentingan

²⁵ Ahmad Syafii Ma'arif, *Al-Qur'an, Realitas Sosial, Dan Limbo Sejarah* (Bandung: Pustaka, 1985), 65.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 2014), 9.

²⁷ Ma'arif, *Al-Qur'an, Realitas Sosial, Dan Limbo Sejarah*, 65.

bangsa Indonesia. Termasuk menyinari Pancasila dengan pesan-pesan teologis dan moral al-Qur'an. Dalam *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Muslim*, Syafii Ma'arif menggambarkan betapa negara yang kehilangan sumber moralnya dapat dengan mudah jatuh, baik lewat perang saudara, serbuan pasukan luar ataupun gabungan keduanya. Dalam kenyataan sejarah, nafsu kekuasaan tanpa didampingi dengan kekuatan moral yang tangguh, pasti merusak.²⁸ Adapun sumber moral yang pertama dan utama bagi muslim adalah al-Qur'an. Hanya di tangan orang yang dikaruniai *'aqlun s}ah}i>b} wa qalbun sali>m* (akal yang sehat dan hati yang tulus) yang dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai al-Qur'an.

Upaya mengkontekstualisasikan al-Qur'an sesuai dengan zamannya merupakan pekerjaan iman dan intelektual yang membutuhkan kontemplasi serius dan mendalam, di samping kearifan yang cerdas. Upaya ini sekaligus menuntut keterlibatan yang sungguh-sungguh, sebab yang hendak ditangkap adalah pesan-pesan al-Qur'an sebagai kesatuan logika, utuh, dan terpadu. Pendekatan parsial terhadap al-Qur'an tidak akan banyak menghasilkan solusi dalam menghadapi berbagai persoalan krusial dan mendasar yang datang silih berganti sejak kemerdekaan bangsa Indonesia. Kejadian 30 September 1965 PKI yang mengakibatkan perekonomian Indonesia berantakan dengan inflasi pada 1966 mencapai 635%, berikut dengan implikasi berkepanjangan lainnya seperti ketahanan pangan yang terancam, dan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, merupakan sejarah pahit yang seharusnya mampu menggugah hati nurani bangsa pada kenyataan bahwa saling curiga-mencurigai disebabkan miskinnya informasi yang diketahui oleh masing-masing pihak yang terlibat.²⁹

Setelah pesan-pesan al-Qur'an berhasil ditangkap dengan cermat, hubungan Pancasila dan Islam pada persoalan filosofis-ideologis yang sangat mendasar selama hampir 75 tahun di Indonesia akan dapat diselesaikan, baik secara teori maupun agama. Strategi penggiringan bola ke arah tujuan yang dimaksud perlu dipikirkan dari sekarang. Syafii Maarif mengatakan bahwa masalah Islam dan Pancasila dapat diselesaikan oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Akan tetapi, bagi Syafii Ma'arif, pemerintah masih belum menempuh usaha yang mengarah pada penyelesaian problem ini secara arif dalam perspektif kenegarawanan. Bagi Syafii Ma'arif, pelarangan untuk tidak

²⁸ Ahmad Syafii Ma'arif, *Krisis Arab Dan Masa Depan Dunia Muslim* (Yogyakarta: Penerbit Bunyan, 2018), 15–19.

²⁹ Anang Sukendar and Anang Sukendar, "PENGUJIAN DAN PEMILIHAN MODEL INFLASI DENGAN NON NESTED TEST STUDI KASUS PEREKONOMIAN INDONESIA PERIODE 1969-1997," *Journal of Indonesian Economy and Business* 15, no. 2 (April 1, 2000): 165–66, <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39301>.

mengagamatkan pancasila atau tidak mempancasilakan agama bukanlah cara yang dapat mengatasi polemik tersebut. Sementara prinsip Ketuhanan dalam sila pertama belum tegas dinyatakan bersumber dari wahyu.³⁰

Jika pernyataan tersebut dikaitkan dengan situasi global umat manusia akhir abad ke-20, dengan kuatnya paham sekularisme, telah membawa bencana yang sangat mengerikan, maka betapa vital dan krusialnya agama bagi kehidupan sekarang ini. Dalam konteks ini, Syafii Ma'arif sependapat dengan Soedjatmoko yang mengatakan bahwa ilmu dan teknologi sekarang ini berhadapan dengan berbagai pertanyaan pokok tentang jalan yang harus ditempuh seterusnya dan yang tidak lagi dapat dijawabnya sendiri. Bagi Soejatmoko, pertanyaan-pertanyaan mengenai ilmu dan teknologi berkisar sekitar kemampuan manusia untuk bisa mengendalikan kembali ilmu dan teknologi, sehingga jalannya tidak menurut kemauannya dan mementumnya sendiri saja, melainkan melayani keperluan dan keselamatan manusia.³¹

Pertanyaan-pertanyaan mengenai dirinya sendiri, tujuan-tujuannya dan cara-cara pengembangannya tidak dapat dijawab lagi oleh ilmu dan teknologi tanpa referensi kepada patokan-patokan mengenai moralitas, makna, serta tujuan hidup manusia, termasuk mengenai yang baik dan yang batil dalam kehidupan manusia modern. Patokan-patokan tentang makna dan moralitas ini ternyata berakar pada agama. Tanpa akar ini, patokan-patokan tadi menjadi relatif artinya dan layu. Krisis kebudayaan yang sekarang melanda sebagian dunia industri membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup dan bernafas lama dalam keadaan mencari lagi kehidupan beragama. Persoalan yang sekarang kita hadapi ialah sampai di mana semua agama di dunia ini sanggup memberi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.³²

Menurut Syafii Ma'arif, bila citra umum umat manusia modern seperti yang digambarkan Soejatmoko, maka tidak ada suatu alasan yang kuat mengapa Pancasila masih malu-malu mengatakan bahwa ia memerlukan moralitas transendental bagi sumber sila-silanya, yaitu prinsip moral yang diajarkan oleh agama wahyu.³³ Dari sudut pandang sosiologis, rakyat Indonesia hampir 100% menyatakan beragama, di antaranya 89% adalah muslim, maka pemerintah yang baik tentu akan selalu mempertimbangkan kenyataan sosiologis ini dalam membuat keputusan-keputusan politik strategis. Syafii Ma'arif

³⁰ Ma'arif, *Al-Qur'an, Realitas Sosial, Dan Limbo Sejarah*, 67.

³¹ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan* (Jakarta: LP3ES, 1984), 203.

³² Soedjatmoko, 203.

³³ Ma'arif, *Al-Qur'an, Realitas Sosial, Dan Limbo Sejarah*, 69.

kemudian membandingkan tentang sesuatu yang kurang dalam kehidupan manusia modern tersebut dengan pemikiran Arnold J. Toynbee. Sejak masa Perang Dunia I, Toynbee merasakan dan mengamati manusia yang bermain dengan perang besar-besaran, dapat diartikan sebagai simptom dari kegagalan rasionalisme dalam menyelesaikan hubungan antar bangsa. Oleh sebab itu, manusia harus mencari kembali sesuatu yang kurang itu dalam nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam *higher religions* (agama yang berorientasi kepada nilai-nilai transendental).

Higher religions adalah lawan dari *lower religions*. Agama-agama yang berorientasi ke atas ini, menurut Toynbee, berusaha menempatkan manusia pada posisi yang memungkinkan untuk mengadakan kontak langsung dengan realitas spiritual yang tertinggi (*ultimate spiritual reality*). Setelah Perang Dunia I, sebab merasakan dan mengamati betapa pentingnya *higher religions* bagi kehidupan manusia, Toynbee yang sebelum Perang Dunia I dikenal sebagai pemikir agnostik, berubah muara menjadi seorang religius-moralis.³⁴ Dengan meminjam bahasa Toynbee, Pancasila bila memang mau tampil secara bermakna dalam dataran sistem filsafat kenegaraan, harus membuka diri untuk menerima sinar dari agama-agama yang berorientasi pada nilai-nilai transendental yang lebih tinggi. Tanpa *higher religions*, Pancasila dikhawatirkan akan selalu berganti warna mengikuti fluktuasi politik kontemporer. Pengalaman pada Demokrasi Termimpin (1959-1965) adalah pelajaran mahal yang dapat dijadikan bahan renungan dalam bernegara dan bermasyarakat.

Kerja-kerja intelektual strategis dan mendasar dalam soal kenegaraan hanya mungkin menghasilkan buah yang segar bila pelaksanaan Demokrasi Pancasila benar-benar mencerminkan hakikat kedaulatan rakyat sebagaimana yang dituntut oleh Pancasila dan UUD 1945. Untuk ini diperlukan kejujuran dan kesungguhan dalam membangun kehidupan bernegara secara sehat, demokratis dan bertanggung-jawab. Islam bila dipahami secara benar dan utuh akan dapat memberikan sumbangan yang sangat menentukan bagi cita-cita luhur itu.

Kesadaran atas Identitas Bangsa dengan Basis al-Qur'an

Pada Suara Muhammadiyah No. 19, Oktober 1982, Syafii Maarif menulis tentang *Al-Qur'an, Pemeluk Beriman dan Limbo Sejarah*.³⁵ Perkataan limbo mengandung arti lebih dari satu. Di antaranya adalah tempat orang yang terlantar atau mereka yang tidak dihiraukan. Namun pada konteks al-Qur'an dan realitas umat saat ini, limbo bisa dipahami sebagai jarak

³⁴ Arnold Toynbee, *An Historian's Approach to Religion* (London: Oxford University Press, 1956), 134.

³⁵ Ma'arif, *Krisis Arab Dan Masa Depan Dunia Muslim*, xiv.

antara cita-cita al-Qur'an dengan kenyataan hidup pemeluknya. Perkara al-Qur'an masih diimani sebagai Kitab Suci yang tahan banting sejarah, adalah sebuah fakta. Tapi perkara kitab ini sudah diabaikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah penting umat Islam, adalah fakta yang lain pula. Syafii Ma'arif pada tulisan tersebut menegaskan bahwa pemeluk beriman, disadari atau tidak, telah lama menelantarkan Kitab Suci ini dalam limbo sejarah.³⁶

Umat Islam pada skala global, diakui atau tidak, sama-sama terkurung dalam jurang antara kata dan laku sambil menyalahkan satu sama lain. Prinsip yang diusung adalah kebenaran tunggal. Masing-masing dari penganut Islam yang kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok merasa paling benar, sementara saudara seimannya yang lain palsu belaka. Parameter yang digunakan untuk saling menghancurkan itu sangat rapuh, tapi diakui sebagai yang benar. Seolah tidak ada kebenaran selain dari kelompokku.

Pada tulisan lainnya, Syafii Ma'arif menjelaskan bagaimana al-Qur'an dalam limbo sejarah itu dengan meminjam kategorisasi Khaled Abou el-Fadl tentang polarisasi antara kelompok puritan dan kelompok moderat.³⁷ Kedua kelompok ini merepresentasikan betapa dalamnya jurang kata dan laku umat beriman di awal abad ke-21. Masing-masing dari mereka merasa berada di jalan yang lurus, tanpa pernah ada keinginan untuk berkaca dan berdialog kepada saudara seimannya sendiri. Kelompok puritan sebagaimana namanya, adalah orang-orang yang ingin hidup *ṣālih* serta menganggap kemewahan dan kesenangan sebagai dosa, sebuah spirit yang ingin memperjuangkan kemurnian doktrin dan tata cara peribadatan suatu agama. Kaum puritan tampak mengkristal dalam format Taliban dan sampai batas tertentu di kalangan orang Arab Saudi. Kelompok ini juga tersebar di berbagai dunia Islam yang umumnya berideologi radikal tunggal, yakni ingin mengubah dunia secara berani dan cepat, sekalipun beresiko terjadinya pertumpahan darah, mereka tidak peduli.³⁸

Dalam konteks puritan Islam, kelompok ini ingin menciptakan sebuah dunia seperti masa dini Islam. Mereka anti semua sistem yang berbau Barat tapi menikmati hasil teknologinya, seperti mobil dan telpon, bahkan teknik membuat bom. Mereka menilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia sebagai produk Barat yang harus dilawan karena merusak Islam. Mereka ingin menciptakan sebuah dunia cita-cita berdasarkan tafsiran mereka yang monolitik terhadap al-Qur'an dan sejarah nabi.³⁹ Sederhananya, mereka sudah tidak adil sejak di alam pikiran. Menurut Syafii Ma'arif, kelompok puritan Islam ini tidak

³⁶ Ma'arif, *Al-Qur'an, Realitas Sosial, Dan Limbo Sejarah*, 2-3.

³⁷ Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*, trans. Helmi Mustafa (Jakarta: Serambi, 2006), 117.

³⁸ Ahmad Syafii Ma'arif, *Al-Qur'an Dan Realitas Umat* (Jakarta: Republika, 2010).

³⁹ Ma'arif, 2.

mempunyai tawaran terhadap dunia yang jelas, tapi relatif terikat ideologi tunggal yang fasistis. Di antara doktrin yang mengikat mereka adalah konsep taat kepada pemimpin, hampir tanpa *reserve*. Karena itu, ada yang menafsirkan bahwa mereka adalah faksi totalitarian dengan payung syariat. Mereka memandang enteng kematian, jika mati itu adalah dalam mencari ridha Allah menurut visi mereka. Benar-benar ekstrem baik teori ataupun aksi.

Sedangkan kelompok moderat menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem. Kelompok ini mengaku berpegang kepada al-Qur'an, tapi umumnya mereka membela gagasan-gagasan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Mereka tidak risau apakah gagasan itu berasal dari Barat atau dari Timur. Selama gagasan itu mendukung cita-cita al-Qur'an untuk membumikan keadilan, perdamaian, moralitas, dan hubungan baik sesama manusia, tidak ada masalah di dalamnya. Kelompok ini, menurut Syafii Maarif, merasakan keperihan saat melihat dunia Islam yang gelap di bawah sistem politik despotisme yang zalim dan korup tapi sering diberi legitimasi agama.. Dorongan keprihatinan ini membawa mereka untuk tidak segan berpendapat bahwa pemerintahan non-muslim yang adil lebih baik dibanding pemerintahan muslim yang zalim dan korup. Mereka kritikal terhadap label yang serba Islam, tapi dalam realitas bertolak belakang dengan pesan universal Islam yang membela keadilan dan suasana hidup rukun sesama umat manusia.⁴⁰

Dibandingkan dengan kelompok puritan yang relatif solid, kelompok moderat tidak terikat dengan ideologi tunggal. Islam bagi mereka tetap menjadi peradaban alternatif masa depan, tapi harus dipahami secara cerdas, jujur, komprehensif, dan historis. Dalam sudut pandang tertentu, kelompok ini nyaris terlihat sempurna karena nilai objektifnya, dan memang begitulah adanya. Hanya saja tugas dari kelompok ini belum selesai. Mencari nilai peradaban lain yang lebih positif adalah baik, tapi tugas muslim untuk menghidupkan nilai-nilai al-Qur'an sebagai pilar peradaban, adalah kebaikan yang sejati. Polarisasi seperti inilah yang dimaksud Syafii Ma'arif dengan al-Qur'an berada di limbo sejarah. Kelompok yang satu menyatakan diri sebagai kelompok pembawa panji kebenaran, namun di bawah panji kebenaran itulah mereka saling baku hantam sesama saudara seiman dalam kurun waktu yang panjang. Sedang kelompok lainnya seolah sibuk mencari kebijaksanaan yang berada di luar al-Qur'an, namun melupakan kebijaksanaan yang ada di dalam al-Qur'an itu sendiri.

Syafii Ma'arif kemudian mencoba menguraikan jalan solutif sehingga al-Qur'an dapat berfungsi kembali sebagai *al-furqa>n* (kriterium pembeda antara yang hak dan yang

⁴⁰ Ma'arif, 3.

batil). Menurutnya, subjektivisme sejarah dan kepentingan pribadi harus dibuang jauh-jauh guna mendapatkan nilai-nilai al-Qur'an yang benar-benar orisinal, yakni nilai rahmat bagi alam semesta, bukan hanya untuk umat Islam.⁴¹ Realitas terkini adalah umat Islam secara keseluruhan tidak berdaya, banyak energi terbuang secara sia-sia, sehingga menjadi bulan-bulanan pihak lain sebab rapuh dari dalam. Islam di Indonesia jauh lebih beruntung karena masih belum banyak tercemar oleh pertikaian klasik dalam teologi, sufisme, filsafat, dan doktrin politik. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia yang jauh dari tempat kelahiran Islam, hingga pembenturan pemikiran di pusat tidak cepat terasa di kawasan pinggir, apalagi pada masa itu hubungan antar bangsa sulit sekali. Alasan lain adalah Islam di Indonesia sejak semula lebih terpusat pada masalah-masalah fikih dan tasawuf, persoalan teologi dan filsafat sedikit sekali mendapat perhatian. Problem lain adalah kemampuan umat Islam Indonesia menguasai sumber (Arab) terbatas pada kelompok kecil, sehingga umat secara keseluruhan tidak punya akses untuk membaca kitab-kitab standar.⁴²

Islam Indonesia punya peluang yang cukup bagus untuk mengembangkan sesuatu yang lebih segar, dan orisinal, tanpa banyak beban tentang berbagai aspek ajaran Islam untuk digumulkan dengan budaya bangsa atau dengan sub-budaya. Interaksi Islam dengan nilai-nilai budaya setempat telah menampilkan agama ini dengan corak yang khas, ramah, dan akomodatif dalam makna yang positif. Penetrasi Islam secara damai di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi telah menjadikan agama ini demikian toleran terhadap unsur lokal, selama semuanya itu tidak berlawanan dengan prinsip tauhid. Meski dari sudut pandang ortodoksi Islam di Indonesia kadang-kadang dinilai berwajah sinkretik, yakni percampuran berbagai unsur aliran atau paham, namun gerak ke arah kemurnian tidak pernah berhenti. Dengan kata lain, budaya sinkretik, cepat atau lambat, sedang bergerak ke arah menuju budaya santri yang dinilai lebih setia kepada pokok ajaran. Gerakan-gerakan Islam yang bermunculan di panggung sejarah Nusantara abad ini semakin mempercepat proses pemurnian itu. Pemurnian dalam arti penyegaran, pencairan, pencerahan dan pencerdasan.

Politik Identitas dan Pluralisme Indonesia: Akar Pemikiran Ahmad Syafii Ma'arif

Indonesia memiliki semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini tertulis di kaki Burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara Republik Indonesia.⁴³ Penetapan *Bhinneka Tunggal Ika* oleh para bapak bangsa

⁴¹ Ma'arif, 4.

⁴² Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 137.

⁴³ Eka Damaputera, *Pancasila: Identitas Dan Modernitas* (Jakarta: Gunung Mulia, 1997), 18.

disertai mimpi yang besar. Kesadaran akan keberagaman mendasari terciptanya motto yang menggambarkan semangat persatuan bangsa yang terdiri dari beraneka ragam agama, suku, bahasa, adat, dan budaya. Namun, semboyan tersebut dalam aktualisasinya tidak semudah yang dibayangkan. Perkembangan teknologi dan maraknya kelompok penyebar hoaks yang berkonten kebencian terhadap suku, agama, realitas plural, dan segala yang berkaitan dengan politik identitas, menjadi ancaman nyata terhadap keutuhan bangsa. Langkah-langkah dalam pengelolaan multi-identitas kemudian dibutuhkan sebagai upaya dalam menjaga persatuan bangsa dan negara. Konsep-konsep ini dapat diperjelas melalui penjabaran dibawah ini.

Politik Identitas: Menjadikan al-Qur'an sebagai Sumber Moral

Membahas pemikiran Syafii Ma'arif mengenai politik identitas yang di dalamnya memuat konsep sekaligus akar konflik multi-identitas bukan saja sulit, tapi senantiasa mengundang polemik spekulatif. Dia tidak memiliki karya khusus, apa dan bagaimana konflik identitas bisa terjadi di Indonesia. Meskipun begitu ada kompilasi tulisan yang berjudul *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* yang di dalamnya memuat orasi politik identitas Syafii Ma'arif dalam acara *Nurcholish Madjid Memorial Lecture*. Dalam orasinya itu, Syafii Ma'arif menggambarkan kategorisasi politik identitas. Dilihat dari rentang waktu, ilmuwan sosial baru tertarik kepada isu politik identitas pada 1970-an, bermula di Amerika Serikat, ketika menghadapi masalah minoritas, jender, feminisme, ras, etnitas, dan kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan, merasa teraniaya. Adapun di Indonesia, menurut Syafii Ma'arif, politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing.⁴⁴ Menurut Syafii Ma'arif, dalam orasinya menyebutkan politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia di masa depan, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang, tapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung-jawab.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Syafii Ma'arif, "Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia," in *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*, ed. Ihsan Ali Fauzi and Samsu Rizal Panggabean (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), 2010), 3–20.

⁴⁵ Ma'arif, "Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia."

Hanya saja kesungguhan dan tanggung-jawab itulah yang sering benar dipertanyakan oleh orang yang larut dalam pragmatisme politik yang tuna-moral dan tuna-visi. Sikap semacam inilah yang menjadi musuh terbesar bagi Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Maka, dibutuhkan gagasan utuh berupa konsep multi identitas yang melebur pada kebinekaan. Pada tahun-tahun awal menjelang proklamasi dan beberapa tahun sesudahnya, para bapak bangsa terbelah menjadi dua kelompok ketika Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, yakni kelompok modernis dan kelompok demokratis. Pertanyaan seputar apakah pancasila merupakan pasung bagi Islam sebagai ideologi politik, merupakan pokok perdebatan dua kelompok tersebut.

Kaum modernis berpendapat bahwa Islam sebagai mayoritas sudah sepantasnya dijadikan rujukan utama dalam berbangsa dan bernegara, berikut perangkat teori negara Islam. Sekularisme dalam bentuk apapun merupakan musuh bersama. Sedangkan kaum demokratis berpendapat sebaliknya, Islam tetap menjadi sumber acuan, namun cukup ruhnya yang digunakan dalam berbangsa dan bernegara, tidak diikuti dengan keinginan mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Pembicaraan tentang identitas sampai pada fase ini mengalami perdebatan panjang yang begitu membosankan. Sekalipun Islam di Indonesia merupakan mayoritas, gagasan tentang mengubah Indonesia menjadi negara Islam merupakan gagasan yang memaksakan kehendak bahkan hampir membunuh keberagaman yang ada di bumi Nusantara. Apalagi, jika mengingat perjuangan melawan penjajah, para pahlawan yang berjuang tidak hanya beragama Islam, seperti Yos Sudarso, Thomas Matulesy, Urip Sumoharjo, WR. Supratman, dan Ignatius Slamet Rijadi.

Baik kelompok modernis ataupun demokratis saling jual-beli argumen guna mempertahankan gagasan masing-masing. Islam dalam internal ajaran agamanya menekankan perjuangan yang damai dan menebar keselamatan, tapi Islam yang digagas oleh kaum modernis yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia sangat tidak sesuai dengan konteks Indonesia yang merupakan negara dengan beragam budaya, adat, bahasa, dan agama. Sedangkan Pancasila sebagai konsep murni, merupakan gagasan yang terlalu umum, terlalu luas, dan terlalu kabur. Pancasila pada mulanya tidak memiliki bentuk purna dalam menghadapi persoalan bangsa. Hal ini terkesan kontradiktif, namun karena ketidakpurnaan itulah Pancasila memiliki peluang baik untuk digunakan sebagai senjata dalam menghadapi persoalan-persoalan konkret. Pertanyaan yang berkembang kemudian bukanlah mengarah pada posisi Pancasila sebagai sebuah

konsep yang koheren, melainkan pada fungsi Pancasila sebagai sumber yang efektif untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada.⁴⁶

Kedua kelompok tersebut bertahan dengan argumennya dalam waktu yang lama. Tampak sekali bahwa perbincangan di kalangan pemimpin-pemimpin umat mengenai perlunya persatuan di kalangan umat muslim, terbukti gagal untuk diaplikasikan ke dalam kenyataan. Perpecahan umat seakan-akan merupakan representasi dari perpecahan para pemimpinnya. Para pemimpin, tempat umat menumpahkan harapan dan kepercayaan, kurang mampu menunjukkan sikap toleransi dan pengendalian diri, serta sulit berkomunikasi antara satu sama lain secara kreatif dan akrab, sebagaimana dituntut oleh semangat persaudaraan dalam Islam.⁴⁷ Dalam perdebatan ini gagasan multi-identitas yang sudah sepijannya melebur pada kebinekaan di Indonesia telah mengalami kegagalan. Syafii Ma'arif memberikan pandangan baru dengan merujuk pada Pancasila dengan Islam sebagai acuan moralnya. Islam dapat bersinergi dengan Pancasila dalam proses kebijakan publik untuk kepentingan seluruh bangsa, tanpa melihat perbedaan agama dan keyakinan hidup. Islam di Indonesia sebagai mayoritas haruslah ditempatkan dalam parameter kualitatif-substansial, bukan parameter kuantitatif-nominal-superfisial yang dapat menyesatkan dan memicu konflik.⁴⁸

Dalam *Fikih Kebinekaan*, Syafii Maarif dengan tegas mengatakan bahwa sebagai kaum muslim, selaku umat mayoritas di Indonesia, dituntut aktif untuk membuktikan kualitas keimanannya terhadap al-Qur'an.⁴⁹ Pendapat Syafii Maarif tersebut didasarkan pada dua ayat dalam surat berbeda yang menurutnya dapat dijadikan rujukan bagi pengakuan terhadap kebinekaan dan toleransi. Ayat yang dimaksudkan oleh Syafii Ma'arif adalah Q.S. al-Hujura>t (49): 13, dan Q.S. al-Hajj (22): 40. Menurut Syafii Ma'arif, ayat pertama mengandug pengertian mengenai bentuk bangsa-bangsa dan berbagai suku dalam berbagai periode sejarah tidak untuk melunturkan dan meruntuhkan bangunan kemanusiaan, tapi justru untuk menguatkannya, sehingga dunia akan terhindar dari konflik berdarah yang semata-mata disebabkan karena perbedaan asal-usul yang membuahkan paham sempit dan sikap intoleran. Manusia beradab pastilah bersikap toleran terhadap berbagai bentuk macam perbedaan. Akan tetapi

⁴⁶ Damaputera, *Pancasila: Identitas Dan Modernitas*, 129–30.

⁴⁷ Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 2006), 116.

⁴⁸ Ma'arif, *Islam Dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban*, 113–14.

⁴⁹ Ma'arif, "Menimbang Kembali Ke-Indonesiaan Dalam Kaitannya Dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebinekaan Dan Toleransi," 27.

idealisme ini sering dirusak oleh perilaku sebagai golongan yang ingin memonopoli kebenaran atas nama agama, ideologi, atau atas nama lainnya.⁵⁰ Sedangkan ayat kedua, menurut Syafii Maarif, mempertegas posisi al-Qur'an sebenarnya dengan menyebutkan bahwa nama Allah tidak hanya disebut terbatas di masjid, tetapi juga di biara, gereja, dan sinagog. Hal ini mengandung pengertian bahwa tidak ada seorang pun yang mempunyai hak prerogatif untuk menghalangi pihak lain menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, perusakan terhadap tempat-tempat ibadah dari agama yang beragam sama artinya dengan pembangkangan terhadap ketentuan Allah dalam al-Qur'an.⁵¹

Sedangkan manusia sebagai seorang individu memiliki integrasi penuh, terorganisasi dalam komunitasnya. Dia membutuhkan rasa aman, penataan hidup yang tenang, serta kebutuhan untuk dihargai. Semakin kebutuhannya terpenuhi, semakin kecil tingkat anarkisnya terhadap realitas objektif. Begitu juga sebaliknya, semakin kebutuhannya terbatas, semakin tinggi ledakan yang akan dia timbulkan. Maka dari itu, karakteristik, keinginan, dan kebutuhan yang muncul dalam diri seseorang tidak dapat dilokalisasi pada satu jenis kebutuhan tertentu. Identitas bagaimanapun merupakan aspek yang sangat rumit. Kebijakan publik yang lahir tanpa mempertimbangkan tingkat sensitifitas dari suatu identitas, akan cenderung mengundang gema ketidakadilan atau bahkan cenderung diskriminatif. Dibutuhkan kerja-kerja plural dan cerdas untuk mensinergikan Islam dengan Pancasila dalam upaya membentuk budaya saling menghormati di tengah keberagaman multi-identitas Indonesia.

Selain itu, parameter kualitatif-substansial yang diupayakan sampai batas optimal, harus diiringi dengan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan dan keberagaman. Kebijakan publik yang sudah dirancang untuk kemaslahatan, kebaikan, dan kesatuan dalam ruang kemajemukan tidak akan berdampak lebih jika tidak diiringi kesadaran pada diri personal. Kedewasaan yang dimaksud adalah pengertian tentang tingkat pemikiran yang ada dalam diri seseorang yang bersifat eksklusif, inklusif, ataupun plural.⁵² Dengan memahami ketiga tipe pemikiran tersebut, setidaknya seseorang tidak akan terjebak pada pilihan paradigmatis yang bersifat dikotomis. Dalam beberapa papernya, Syafii Ma'arif terang ingin mengembalikan permasalahan kepada al-Qur'an. Spiritnya hampir sama

⁵⁰ Ma'arif, 26.

⁵¹ Ma'arif, 27.

⁵² Aksin Wijaya, *Kontestasi Merebut Kebenaran Islam Di Indonesia: Dari Berislam Secara Teologi Ke Berislam Secara Humanis* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 67.

dengan kelompok pemikir eksklusif, namun berbeda di titik tekan. Kelompok eksklusif ingin mengembalikan permasalahan kepada al-Qur'an, lalu dibenturkan dengan *project oriented* yang bertujuan untuk penggaburan struktur nalar berpikir Islam yang akan berujung kepada perpecahan. Sedang apa yang ingin disampaikan Syafii Ma'arif adalah menempatkan al-Qur'an sebagai sumber acuan moral supaya tidak terkooptasi oleh nalar *project oriented* yang bertolak pada nalar perpecahan dengan tujuan menggali pesan universal dalam makna generik.

Ego dan Keakuan

Pada tanggal 29 Juni 1998, Ahmad Syafii Maarif menyampaikan kegelisahannya yang disadurkan dari Kuntowijoyo dalam sebuah seminar di Jakarta. Kuntowijoyo pernah berkata bahwa sastra telah gagal di Indonesia. Gagal dalam arti memperluas budi bangsa ini, gagal dalam makna mengantisipasi krisis dahsyat yang sedang melanda hampir seluruh elemen masyarakat di Indonesia.⁵³ Syafii Ma'arif kemudian menambahkan bahwa yang gagal bukan hanya sastra. Pancasila dan agama juga telah gagal membawa bangsa ini agar tetap berada dalam koridor moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.⁵⁴ Hal ini merupakan titik kesukaran lainnya untuk memahami akar konflik multi-identitas dalam pemikiran Syafii Ma'arif. Dia seolah memiliki dua sikap, cara pandang paradoksial dalam melihat Islam dan Pancasila. Di satu sisi, dia ingin mensinergikan Islam dalam aktualisasi kehidupan sehari-hari di bawah payung Pancasila. Sedangkan di sisi yang lain, ia juga mengkritik Pancasila yang gagal menjadi wadah keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁵

Konflik tidak akan tampak berbahaya jika hanya dibicarakan sebatas teori. Memadukan antara teori dengan peristiwa faktual seputar konflik akan membawa kepada fase perenungan yang mendalam. Krisis Arab dan masa depan dunia Islam yang banyak menjadi tema pembahasan Syafii Ma'arif. Konsep persaudaraan yang termaktub dalam Q.S. al-Hujura>t [49]: 10, mengajarkan bahwa setiap mukmin adalah saudara, Namun realitas yang tampak tidak mencerminkan hal tersebut. Keadaan negara-negara Arab, sebagai representasi negara Islam, sudah lama tidak kondusif. Ledakan bom terjadi di mana-mana, anak-anak kehilangan orangtuanya, kehilangan masa depannya, tidak

⁵³ Kuntowijoyo, *Budaya Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).

⁵⁴ Ma'arif, *Islam Dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban*, 84.

⁵⁵ Ma'arif, *Krisis Arab Dan Masa Depan Dunia Muslim*, 24.

mendapatkan pelajaran, bahkan menyentuh aspek paling sentimentil, tidak mengerti bagaimana ajaran agamanya yang disebut dengan Islam.⁵⁶

Argumen yang memepertanyakan kembali posisi Pancasila sebagai identitas negara, secara tidak langsung juga mempertanyakan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam sila pertama pancasila. Perdebatan ini justru mengarah bukan pada pertanyaan kebenaran konsep, akan tetapi pada proses identifikasi. Karena konflik yang terjadi lebih banyak dilatarbelakangi oleh ego dan ketamakan personal, bukan pada konsepnya. Ego dan ketamakan bukan hanya akar konflik yang berada di Timur Tengah, tapi akar konflik dan musuh utama yang ada di seluruh dunia. Indonesia memang bukan negara Islam, tapi penganut Islam di Indonesia dari skala negara merupakan yang terbesar di dunia. Akar-akar konflik yang ada di dunia Islam, Timur Tengah dan sekitarnya, bisa dinekasikan untuk memahami akar-akar konflik yang ada di Indonesia.

Menyebut ego dan ketamakan sebagai akar konflik tidak lahir tanpa sebab. Jika direnungkan secara mendalam, dalam konteks peradaban Islam sebagaimana yang disoroti oleh Syafii Ma'arif, ego dan ketamakan benar-benar menjadi faktor utama terjadinya perpecahan. Perpecahan di sini tidak berada dalam ruang multi-identitas. Krisis politik berdarah pertama antara 'Ayshah binti Abu> Bakr yang dipimpin oleh Thalhah bin Ubayd Allah dan Zubayr bin Awwam berhadapan dengan Ali> bin Abi> T{a>lib. 'Aisyah adalah istri Rasulullah, sedangkan Ali merupakan sepupu dan menantunya.⁵⁷ Perang antara 'Ayshah dan Ali>, yang dikenal dengan perang Jamal, seharusnya tidak pernah. Hal ini mengingat aktor dalam perang tersebut adalah orang-orang terdekat Nabi Muhammad yang dibimbing langsung oleh Rasul.

Krisis kedua dalam politik berdarah Islam adalah apa yang dikenal sebagai *al-fitnah al-kubra* antara Ali> bin Abi> T{a>lib dan Muawiyah bin Abi> Sufya>n. Perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, dalam kajian sejarah dikenal dengan Perang Shiffin.⁵⁸ Selama peperangan ini terjadi, banyak korban tewas tanpa maksud yang jelas, dan mereka yang wafat dari kedua belah pihak itu sama-sama muslim. Padahal sekali lagi, setiap mukmin adalah saudara dan perpecahan itu tidak berada di ruang multi-dimensional. Syafii Ma'arif dalam bukunya *Krisis Arab dan Masa depan Islam*,

⁵⁶ M Muttaqien, "Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional Dan Global," *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 2 (December 14, 2017): 263, <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.262-276>.

⁵⁷ H{asan Ibra>h}i>m H{asan, *Ta>rikb Al-Isla>m: Al-Siya>si> Wa Al-Di>n Wa Thaqa>fi> Wa Al-Ijtima'i>*, vol. 1 (Mesir: Maktabah al-Nahd}ah wa al-Mis}riyah, n.d.), 267.

⁵⁸ Ahmad Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, trans. Mukhtar Yahya, vol. 2 (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), 31.

menggambarkan kedua bencana politik di atas langsung ke akarnya. Ketika pasukan Ali nyaris menang, ‘Amr bin Ash, sebagai panglima perang Muawiyah mengajukan perdamaian di Dumatul Jandal. Peluang ini digunakan ‘Amr bin ‘Ash untuk mengganti Ali sebagai khalifah dan menobatkan Muawiyah sebagai penggantinya.⁵⁹

Dari Perang Shiffin inilah kemudian umat Islam terbagi menjadi tiga kelompok besar, Sunni, Syi’ah dan Khawarij. Dari satu identitas tunggal menjadi multi-identitas. Ini yang perlu ditekankan, bahwa dalam identitas tunggal pun, manusia tidak bisa mengalahkan keinginannya untuk tampil lebih dihadapan orang lain. Ego dan ketamakan sekaligus menjadi alasan kuat mengapa *political dignity* menjadi entitas terdalam dari sebuah konflik. Siapapun yang membaca sejarah Islam pasca wafatnya Nabi, pasti akan merasa heran. Ajaran setiap mukmin itu bersaudara tidak lagi menemukan eksistensinya di hadapan umat Islam. Ajaran itu bernilai namun tidak diamalkan. Bermakna namun diabaikan begitu saja. Hal ini semakin menjelaskan bahwa nilai ke-akuan dan ego manusia telah memalingkan diriya dari wajah al-Qur’an. Al-Qur’an diimani sebagai Kitab Suci yang tidak tergerus oleh sejarah adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Akan tetapi, kitab ini sudah diabaikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah umat Islam adalah fakta yang lain.⁶⁰

Peristiwa ini nampak membernarkan pandangan Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa Islam dikaburkan oleh perilaku orang-orang Islam itu sendiri.⁶¹ Pandangan ini keluar ketika Abduh datang dari Mesir ke Prancis. Abduh merasa bahwa Prancis merupakan negeri yang indah dan tertata. Ia menemukan nilai-nilai Islami di negara yang tidak ada Muslim. Setelah berdakwah dalam waktu yang cukup lama, Abduh kembali ke Mesir, dan mendapati fenomena sebaliknya. Abduh melihat Muslim tapi tidak melihat Islam. Aspek yang membuat Abduh melontarkan statmen tersebut adalah aspek utama yang banyak dibahas ulama pada laman-laman awal kitab fiqh, yakni *ṭaharah*. *Tṭaharah* yang dalam bahasa Indonesia berarti bersuci, atau dalam bahasa kesehariannya bersih-bersih, hanya dibaca oleh umat Islam dan diamalkan sebagiannya saja. Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan tempat, tapi pada realitasnya banyak umat muslim yang justru tidak menjaga kebersihan. Statmen Abduh tersebut bersumber

⁵⁹ Ma’arif, *Krisis Arab Dan Masa Depan Dunia Muslim*.

⁶⁰ Lihat Ahmad Syafii Ma’arif, *Al-Qur’an dan Realitas Umat*, Jakarta: Republika, 2010.

⁶¹ Muhammad Rashid Ridwan, *Shubhat Al-Nasara Wa Hujjat Al-Islamiyyin* (Kairo: Dar al-Nashr li al-Jam’at, 2009), 14.

dari aplikatif seorang muslim terhadap nilai-nilai keislaman, dan tentu masih banyak lagi nilai Islam yang tertutup perilaku muslim.

Dalam konteks Indonesia, egoisme dan keakuan juga kerap menjadi faktor menguatnya konflik identitas. Rangkaian aksi damai 212 yang berkumpul secara berkala di Jakarta, dapat menjadi contoh betapa kompleks persoalan mengenai identitas yang dimotori oleh ego dan dapat menjadi eskalasi konflik yang begitu monoton. Para demonstran menuntut kepada pemerintah untuk mengadili Ahok yang dianggap telah menistakan kitab suci umat Islam. Para demonstran yang dilihat berdasarkan kapasitas penghuni DKI Jakarta telah memenuhi batas dari Ibukota Republik Indonesia. Dampak dari adanya aksi damai tersebut dapat dilihat dengan masjid yang penuh sesak, jalan-jalan tidak bisa dilewati kendaraan, kemacetan ada di mana-mana, berikut dampak dan implikasi lainnya. Pertanyaan yang sepantasnya diajukan dalam konflik seperti itu adalah dapatkah seorang muslim berterus-terang mengakui bahwa orang yang berada di luar Islam akan selamat. Karena dalam ajaran agama apa pun mengindikasikan bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling benar, jika pertanyaan ini dapat terjawab, satu di antara penyebab utama konflik bagi orang yang berbeda kepercayaan akan hilang.

Kepentingan politik sesaat merupakan faktor besar yang dapat merusak atau bahkan menghancurkan persaudaraan antar anak bangsa. Politik tanpa acuan moral yang jelas hanya punya satu muara, yaitu pengkhianatan terhadap seluruh roh agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ego dan sifat keakuan harus ditundukkan terlebih dahulu. Peran pendidikan tidak diragukan lagi merupakan aspek yang sangat menentukan. Sudah seyogyanya jika peserta didik sejak kecil diajarkan untuk hidup berdampingan di tengah masyarakat plural. Diperlukan kerja-kerja besar yang terencana, terstruktur, aktif, kreatif dan kolektif untuk menyongsong pencerahan.

Kesimpulan

Perdebatan identitas kebangsaan dalam konteks Indonesia masih dalam wilayah yang rawan. Kemunculan beberapa organisasi dan gerakan yang memaksakan perubahan identitas negara bermunculan. Alhasil, Indonesia yang multikultural dipaksakan untuk menerima Islam sebagai identitas tunggal negara. Hal ini justru memancing Islam sebagai agama masuk dalam perdebatan kenegaraan. Problem identifikasi diri ini kemudian menyebabkan penentuan identitas bagi yang lain yang menyebabkan saling klaim kebenaran antara satu dengan yang lain. Dalam konteks ini, Ahmad Syafii Ma'arif menawarkan konsep multi-identitas yang mencerminkan moral Islam dalam identitas negara, yakni Pancasila.

Konsepsi Syafii Maarif terhadap pengelolaan multi-identitas di Indonesia menuntut adanya keterlibatan langsung dari pemerintah. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan pengelolaan terhadap keberagaman, praktik korupsi, dan sikap-sikap diskriminatif. Meskipun demikian, kebijakan yang diambil pemerintah harus didukung oleh segenap masyarakat, karena kesadaran terhadap realitas plural pada dasarnya merupakan tanggung-jawab kolektif. Islam sebagai agama, menurut Syafii Ma'arif, seharusnya diletakkan pada posisi sumber identitas, bukan dijadikan alat legitimasi terhadap identitas yang diinginkan. Konsep multi-identitas, bagi Syafii Ma'arif merupakan sebuah usaha untuk menyadarkan dan mendorong nilai-nilai humanis Islam dan menggabungkannya dengan Pancasila sebagai jembatan dalam mengatasi disintegritas bangsa, membangun visi bersama di tengah kemajemukan, menjaga kesatuan bangsa, dan menjadikan Indonesia terhormat di mata dunia.

Konsep-konsep yang ditawarkan oleh Syafii Ma'arif untuk mengatasi krisis identitas yang terjadi di Indonesia, bukan satu-satunya konsep yang dapat menyelesaikan problem ini. Beberapa konsep lain perlu dihadirkan untuk memberikan pengembangan dan konsep baru yang dapat digunakan oleh banyak kalangan, termasuk kebijakan pemerintah dalam mengatasi kompleksitas perdebatan mengenai identitas negara. Dalam konteks ini, penelitian ini dapat menjadi acuan pembanding bagi konsep-konsep lain yang hendak ditawarkan, sehingga persoalan identitas dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Al-Munawar, Said Agil Husin. "Fikih Siyasah Dalam Konteks. Perubahan Menuju Masyarakat Madani." *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (1999).
- Ali, Mohamad. "PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM AHMAD SYAFII MAARIF." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 17, no. 02 (October 7, 2017): 1. <https://doi.org/10.23917/profetika.v17i02.5293>.
- Burgio, Franco. *Hizb Ut-Tabrir in Central Asia: Messengers of a Coming Revolution?* Norderstedt: Druck Und Bindung, 2007.
- Damanhuri, Damanhuri. "ISLAM, KEINDONESIAAN, DAN KEMANUSIAAN (TELAAH PEMIKIRAN AHMAD SYAFII MAARIF)." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (February 11, 2016). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v14i1.644>.
- Damaputera, Eka. *Pancasila: Identitas Dan Modernitas*. Jakarta: Gunung Mulia, 1997.
- Dian Erika Nugraheny. "BIN: Tujuh PTN Di 15 Provinsi Terpapar Paham Radikal | Republika Online." Accessed June 21, 2020. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/11/20/pii02s354-bin-tujuh->

ptn-di-15-provinsi-terpapar-paham-radikal.

- Erikson, Erik H. *Identity and The Life Cycle*. New York: W.W. Norton, 1994.
- Esposito, John L. "The Muslim Diaspora and The Islamic World." In *Islam, Europe's Second Religion: The New Social, Cultural, and Political Landscape*, edited by Shireen Hunter. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2002.
- Fadl, Khaled Abou El. *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*. Translated by Helmi Mustafa. Jakarta: Serambi, 2006.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. Translated by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. London: Continuum, 2006.
- H{asan, H{asan Ibra>h}i>m. *Ta>rikb Al-Isla>m: Al-Siya>si> Wa Al-Di>n Wa Thaqafi> Wa Al-Ijtima'i>*. Vol. 1. Mesir: Maktabah al-Nahd}ah wa al-Mis}riyah, n.d.
- Hilmy, Masdar. "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (January 22, 2014): 1. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13>.
- Ittihadiyah, Himayatul. "MERUNUT IDENTITAS ISLAM INDONESIA (Kajian Historiografi Menurut Ulama Kontemporer Yogyakarta, Perspektif Muhammadiyah, NU, HTI, Dan MMI)." *Jurnal Penelitian Agama* 17, no. 3 (2008).
- Jaramillo, Jamie, Zena R. Mello, and Frank C. Worrell. "Ethnic Identity, Stereotype Threat, and Perceived Discrimination Among Native American Adolescents." *Journal of Research on Adolescence* 26, no. 4 (December 1, 2016): 769–75. <https://doi.org/10.1111/jora.12228>.
- Kharisma, Tiara. "Konflik SARA Pada Pilkada DKI Jakarta Di Grup WhatsApp Dengan Anggota Multikultural." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 20, no. 2 (December 18, 2017): 107–20. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.233>.
- Kuntowijoyo. *Budaya Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. *Al-Qur'an, Realitas Sosial, Dan Limbo Sejarah*. Bandung: Pustaka, 1985.
- . *Al-Qur'an Dan Realitas Umat*. Jakarta: Republika, 2010.
- . *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perbebatan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- . *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- . *Islam Dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban*. Yogyakarta: DIVA Press, 2018.
- . *Krisis Arab Dan Masa Depan Dunia Muslim*. Yogyakarta: Penerbit Bunyan, 2018.
- . "Menimbang Kembali Ke-Indonesiaan Dalam Kaitannya Dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebinekaan Dan Toleransi." In *Fikih Kebinekaan*, edited by Wawan Gunawan Abdul Wahid, Muhammad Abdullah Darraz, and Ahmad Fuad Fanani. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- . "Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia." In *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*, edited by Ihsan Ali Fauzi and Samsu Rizal Panggabean.

- Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), 2010.
- Marlena, Leni. "Hubungan Islam Dan Negara Dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif." *Manthiq* 3, no. 2 (February 27, 2020). <https://doi.org/10.29300/MTQ.V3I2.2898>.
- Muttaqien, M. "Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional Dan Global." *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 2 (December 14, 2017): 262. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.262-276>.
- Qorib, Muhammad. "Ahmad Syafii Maarif: Kajian Sosial-Intelektual Dan Model Gagasan Keislamannya." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (December 30, 2017): 63–82. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v9i2.1383>.
- Ridwan, Muhammad Rashed. *Shubhat Al-Nasara Wa Hujjat Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Nashr li al-Jama'at, 2009.
- Rummens, Joanna W. A. "Personal Identity and Social Structure in Saint Martin : A Plural Identities Approach." York University, 2013.
- Salim, Agus. "The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia (1982-2004) Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilization, and Collective Action Frames." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
- Saputro, Agus. "AGAMA DAN NEGARA : POLITIK IDENTITAS MENUJU PILPRES 2019." *ASKETIK* 2, no. 2 (December 25, 2018): 111–20. <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912>.
- Shihab, M. Quraish. *Lentera Al-Qur'an*. Jakarta: Mizan, 2014.
- Soedjatmoko. *Etika Pembebasan*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Sukendar, Anang, and Anang Sukendar. "PENGUJIAN DAN PEMILIHAN MODEL INFLASI DENGAN NON NESTED TEST STUDI KASUS PEREKONOMIAN INDONESIA PERIODE 1969-1997." *Journal of Indonesian Economy and Business* 15, no. 2 (April 1, 2000): 164–78. <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39301>.
- Syadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Dan Sejarah Pemikirannya*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*. Translated by Mukhtar Yahya. Vol. 2. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.
- Toynbee, Arnold. *An Historian's Approach to Religion*. London: Oxford University Press, 1956.
- Tualeka, M. Wahid Nur. "Konsep Toleransi Beragama Menurut Buya Syafii Ma'arif." *Al-Hikmah* 4, no. 1 (January 6, 2019). <http://103.114.35.30/index.php/Ah/article/view/2333>.
- Wandi, Wandu, M Arif Musthofa, and Khusnul Yatima. "MENELAHAH KEMBALI GAGASAN PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN AHMAD SYAFII MAARIF JALAN TENGAH KEBERAGAMAN." *KERATON: Journal of History Education and Culture* 1, no. 2 (January 12, 2020). <https://doi.org/10.32585/KERATON.V1I2.519>.
- Wijaya, Aksin. *Kontestasi Merebut Kebenaran Islam Di Indonesia: Dari Berislam Secara Teologi Ke Berislam Secara Humanis*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Wikandono, Muchrom, and Aman. "The Development of Contemporary Islamic Thought in Indonesia in the 2013 Curriculum (Ahmad Syafi'i Ma'arif's Thoughts)," 79–82. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.017>.

Wulansari, Putri. "SEKULERISASI POLITIK DAN ULAMA DI INDONESIA DALAM PRESFEKTIF AHMAD SYAFII MAARIF." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fiker* 7, no. 2 (July 17, 2018): 235–44. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v7i2.2524>.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses merupakan jurnal yang berada di bawah naungan Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses didesain untuk memudahhi dan mendialogkan karya ilmiah para peneliti, dosen, mahasiswa dan lain-lain dalam bidang studi: Filsafat Islam, al-Qur'an dan Hadis, dan Studi Agama dan Resolusi Konflik, baik dalam ranah perdebatan teoretis maupun hasil penelitian (pustaka dan lapangan)

Living Islam: Journal of Islamic Discourses terbit dua kali dalam satu tahun, yakni pada bulan Juni dan November.

PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

